

ANALISIS POTENSI PAD RETRIBUSI PARKIR DAN PASAR KABUPATEN MALANG

HADI SUMARSONO

ABSTRAK

APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam konteks semacam inilah studi tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar menyusun memformulasikan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan PAD dalam rangka mempercepat pembangunan. bahwa posisi peningkatan pendapatan retribusi parkir dan pelayanan pasar berada pada kuadran 2 (dua) yang artinya bahwa dominasi padakombinasi faktor kekuatan dan hambatan.

Kata kunci : PAD, Retribusi parkir dan pasar

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Melalui APBD ini diharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator, dinamisator serta fasilitator pembangunan daerahnya.

Terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi pendapatan, APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari dana perimbangan dari pemerintah pusat. Idealnya, daerah mampu mandiri dalam membiayai pembangunannya, akan tetapi pada kenyataannya Dana Alokasi Umum (DAU) masih merupakan sumber utama pendapatan daerah. Dana DAU (perimbangan) ini sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sehingga proporsi anggaran untuk

pembangunan menjadi lebih kecil. Maka tak heran, apabila bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan setelah otonomi daerah lebih rendah dari pos pengeluaran pada tahun anggaran yang sama dibandingkan dengan pengeluaran rutin atau belanja aparat. Maka, untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut kreatif untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD bisa dijadikan sebagai indikator sejauhmana kemampuan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya. Kemandirian ini selaras dengan salah satu prinsip desentralisasi fiskal.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Alamat Korespondensia:

Hadi Sumarsono, Dosen FE Universitas Negeri Malang

Email:-

Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Upaya optimalisasi PAD bagi daerah menjadi faktor penting dalam perencanaan strategi belanja daerah. Diantara 4 sumber PAD yang sayh menurut UU, pajak dan retribusi daerah menduduki proporsi kontribusi yang paling tinggi. Hal ini mendorong pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan obyek-obyek pajak

dan retribusi baru. Apabila hal ini tidak terkontrol, maka kebijakan ini tak ayal akan menimbulkan berbagai bentuk distorsi dan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lewis (2003) meneliti selama 3 tahun sejak 2001 terhadap pajak dan retribusi di Indonesia dan menemukan tidak adanya korelasi positif antara perda pajak dan retribusi daerah dengan tambahan PAD bagi daerah. Bahkan Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa eksploitasi PAD yang berlebihan dan tanpa di imbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi disinsentif bagi daerah dan dapat mengancam perekonomian daerah (efek Leviathan).

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Dalam konteks semacam inilah studi tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar menyusun memformulasikan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan PAD dalam rangka mempercepat pembangunan.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Gambaran Potensi, Realisasi dan Gap Capaian komponen PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi parkir dan pasar;
- b. Bagaimanakah Elastisitas dari komponen PAD khususnya retribusi parkir dan pasar terhadap PDRB Kabupaten Malang;
- c. Saran dan Rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi dari komponen PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi pasar dan parkir;

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui Gambaran Potensi, Realisasi dan Gap Capaian dari komponen PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi parkir dan pasar;
- b. Untuk mengetahui Elastisitas dari komponen PAD terhadap PDRB Kabupaten Malang, khususnya retribusi parkir dan pasar;
- c. Untuk mengetahui Saran dan Rekomendasi Kebijakan mengenai optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi dari komponen PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi parkir dan pasar;

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT ANALISIS

1. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

sedangkan yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian di atas maka otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, dan didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab yang diletakkan pada daerah Kabupaten dan kota, oleh karenanya pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Abdullah (2000:24), langkah maju yang terlihat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini, adalah adanya pengakuan bahwa pada dasarnya semua kewenangan sudah ada pada daerah kabupaten dan daerah kota, sehingga tidak perlu lagi dilakukan penyerahan kewenangan secara aktif, seperti di masa lalu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sekarang hanya diperlukan semacam pengakuan dari Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah kemampuan daerah di bidang keuangan untuk mencukupi

penyelenggaraan pemerintahan, memproses dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan pelayanan daerah terhadap masyarakat. Pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di tunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan sumber pendapatan asli daerah dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan telah lama di canangkan dan di mulai sejak pelita I, kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu cerminan dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih otonom tanpa mengabaikan pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya di maksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya (Insukindro dkk, 1994:1).

2. Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber yang berasal dari penerimaan asli daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU No.22, 1999). Ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah beserta potensinya, diatur secara terpisah dalam UU No. 18 Tahun 1997. Untuk mendorong efisiensi, maka undang-undang mengenai pajak dan retribusi ini (dikenal

sebagai UU PDRD) memberikan suatu penyederhanaan atas banyaknya jenis pajak dan retribusi di masa lalu yang cenderung mengakibatkan timbulnya biaya ekonomi yang tinggi. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka jumlah pajak dan retribusi daerah relatif berkurang. Jumlah pajak daerah berkurang dari 12 menjadi 6 jenis pajak daerah. Sementara untuk retribusi daerah berkurang dari 17 menjadi 12 jenis retribusi daerah.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari hal-hal berikut.

1. Pendapatan asli daerah yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan untuk daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipasarkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup di sediakan oleh swasta.

3. Kapasitas PAD

Kemampuan keuangan merupakan faktor yang sangat penting, karena sesuai dengan asas desentralisasi bahwa daerah sebagai

daerah otonom berhak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri yang prinsipnya semua pembiayaan rumah tangga daerah harus dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Untuk itu evaluasi terhadap retribusi sebagai sumber-sumber pendapatan pemerintah dapat dilihat dari segi hasil yaitu bahwa penerimaan retribusi harus memadai dalam arti cukup besar dan dengan biaya pungutnya yang rendah, hasil yang diharapkan mudah diperkirakan dan tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu, penerimaan retribusi harus bersifat elastis terhadap pertumbuhan penduduk, inflasi dan PDRB. Keadilan yaitu dasar pengenaan dan kewajibannya membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Adil secara horizontal artinya beban pajak/retribusi harus sama meskipun di kenakan pada berbagai kelompok yang kedudukan ekonominya sama. Adil secara vertikal artinya beban pajak/retribusi harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya yang besar dan harus adil dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Efisiensi ekonomi artinya hendaknya jangan menghambat penggunaan sumber daya. Kemampuan melaksanakan artinya harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun aspek administratif, kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Selain itu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan cara pungutannya pada obyek dan subyek yang dikenakan sebelumnya dilakukan intensifikasi yaitu melakukan perhitungan potensi penerimaan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan

penyuluhan dan peningkatan pelayanan. Retribusi memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya, untuk itu perlu digali dan dikelola secara efisien agar tidak terjadi pemborosan atau mengurangi penghamburan namun demikian apabila dalam menetapkan tarif terjadi kesalahan dapat membawa pengaruh yang negatif terhadap aspek pemerataan keadilan.

4. Potensi Retribusi Dan Kontribusi Terhadap Pad

Menghitung potensi retribusi pasar. Potensi retribusi pasar dihitung sesuai dengan potensi penerimaan masing-masing pasar (pasar umum dan pasar hewan) dengan berdasarkan informasi sebagai berikut .

- a. Jumlah pedagang di kios, los, pelataran dengan masing-masing ukuran luasnya dan jenis dagangan.
- b. Jumlah hewan kecil dan jumlah hewan besar.
- c. Tarif retribusi dan jumlah hari pasaran buka.

Formulasinya adalah sebagai berikut.

$$\text{Pasar umum} = (Jk \times Tr) + (Jl \times Tr) + (Jp \times Tr) \times (Hp \times 12) \dots \dots \dots (2.4)$$

$$\text{Pasar hewan} = (Jhk \times Tr) + (Jhb \times Tr) \times (Hp \times 12) \dots \dots \dots (2.5)$$

Pasar desa = 40 % dari penerimaan realisasi retribusi pasar desa

- Jk adalah jumlah pedagang di kios
- Jl adalah jumlah pedagang di los
- Jp adalah jumlah pedagang di pelataran
- Tr adalah tarif
- Jhk adalah jumlah hewan kecil
- Jhb adalah jumlah hewan besar
- Hp adalah hari pasaran buka

Menghitung potensi retribusi parkir. Potensi parkir dapat dihitung dengan proksi terhadap luasan parkir yang tersedia dikalikan potensi jumlah kendaraan yang parkir tiap hari dikalikan tarif parkir.

$$\text{Parkir} = \text{Luas parkir} \times \text{Jmlh Kendaraan parkir} \times \text{tarip}$$

Proyeksi penerimaan retribusi pasar dan parkir dengan menggunakan metode faktorial dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Jumlah penerimaan retribusi

pasar di masa yang akan datang diproyeksikan dengan mempertimbangkan variabel yang berpengaruh terhadap retribusi pasar atau dapat dikelompokkan menjadi variabel yang tidak dapat di kendalikan (pertumbuhan penduduk, inflasi dan pertumbuhan ekonomi) serta variabel yang dapat dikendalikan (menambah jumlah dan obyek retribusi, mengurangi tunggakan dan meningkatkan penerimaan) metode faktorial ini dapat diringkas dengan menggunakan tabel berikut ini.

Tabel 1 Variabel yang Berpengaruh Terhadap retribusi Pasar

No	Variabel	Tindakan
	Estimasi dasar	Estimasi tahun yang berjalan
	Peningkatan cakupan	Menambah jumlah dan obyek retribusi Meningkatkan penerimaan Mengurangi tunggakan
	Pertumbuhan penduduk	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
	Pertumbuhan PDRB riil per kapita	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
	Perubahan nilai uang atau inflasi	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan, khususnya terhadap tarif yang bersifat tetap
	Penyesuaian tarif	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan, jika perlu tarif dapat di rubah
	Pembangunan baru	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
	Sumber pendapatan baru	Estimasi pengaruhnya terhadap SK baru
	Perubahan peraturan	Estimasi pengaruhnya terhadap SK baru

Asumsi yang dipakai dalam menggunakan metode faktorial ini.

1. Retribusi tahun yang berjalan/estimasi dasar.
2. Kenaikan harga karena inflasi.
3. Penyesuaian tarif.
4. Pembangunan baru/perluasan pasar.

Kontribusi retribusi pasar parkir terhadap pendapatan asli daerah. Besaran ini digunakan

untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan retribusi pasar dengan total penerimaan pendapatan asli daerah. Formulasinya adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{100\% \dots (2.3) Y} \times$$

X adalah realisasi penerimaan retribusi pasar
y adalah realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian *Penelitian/Kajian Pemetaan Data Potensi Pad Kabupaten Malang* ini adalah: menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. dan kualitatif dengan menggunakan data-data yang bersumber dari SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar Kabupaten Malang serta dikonfirmasi dengan hasil observasi dan survey yang dilakukan di lokasi-lokasi sumber retribusi yaitu parkir dan pasar di Kabupaten Malang.

Metode analisis yang digunakan adalah metode perbandingan (*comparation*) perhitungan potensi dan capaian realisasi PAD untuk mengetahui Gap, metode elastisitas PAD untuk mengetahui dampak terhadap pertumbuhan daerah (PDRB) terhadap PAD, serta analisis kondisional untuk usulan saran kebijakan intensifikasi dan

Tabel 2. Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sedan	4.725
2	Jeep	3.566
3	Station Wagon	20.545
4	Bus Biasa	1.328
5	Truk	8.501
6	Pick Up	6.223
7	Ambulance	19
8	Sepeda Motor	396.143

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2009

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Malang di

ekstensifikasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh bagi permasalahan PAD di Kabupaten Malang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Retribusi Daerah Kabupaten Malang

Retribusi daerah merupakan komponen yang relatif signifikan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Pada tahun 2010 komponen ini dianggarkan untuk mencapai Rp. 34.567.912.700,- atau sekitar 27,8 % dari total PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 124.388.805.700. Namun demikian kontribusi terbesar masih di dominasi oleh komponen lain-lain PAD yang sah.

Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan potensi yang ada menunjukkan gap yang besar dan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan retribusi, khususnya parkir di jalan umum dan pelayanan pasar. Tabel 4.9. dan 4.10 di bawah ini menunjukkan beberapa informasi tentang besarnya potensi peningkatan retribusi.

dominasi oleh sepeda motor sejumlah 396.143 buah. Jenis kendaraan ini pula yang memiliki pertumbuhan jumlah yang relatif cepat dari tahun-ke tahun. Oleh karena itu potensi parkir untuk jenis kendaraan juga sangatlah tinggi walaupun tarif parkir untuk jenis kendaraan ini sangatlah kecil. Potensi akan nampak pada jumlah titik parkir di Kabupaten Malang. Pada kecamatan-kecamatan besar seperti Kepanjen dan Singosari, UPTD pengelola parkir di kawasan tersebut memiliki jumlah titik parkir yang lebih banyak dibandingkan dengan UPTD lainnya. Potensi tersebut masih sangat mungkin diperluas dalam kerangka intensifikasi dan ekstensifikasi. Tabel 3 merupakan Potensi Titik Parkir di Kabupaten Malang berdasarkan UPTD nya.

Tabel 3. Potensi Titik Parkir Berdasarkan UPTD Tahun 2010

No	UPTD	Titik Parkir
1	Kepanjen	28
2	Singosari	25
3	Dampit	4
4	Pujon	4
5	Gondanglegi	7
6	Tumpang	7
7	Pagak	7
8	Turen	9

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang

Sedangkan data potensi pasar menunjukkan bahwa jumlah pedagang di seluruh pasar Kabupaten Malang berjumlah 17.442 yang tersebar pada 16 pasar kelas 1, 9 pasar kelas 2 dan 7 pasar kelas 3 serta 1 pasar STA Mantung.

2. Analisis GAP

Berdasarkan target APBD, realisasi dan hasil survey potensi dari retribusi parkir dan pasar, terlihat bahwa kondisinya sebagai berikut:

Target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp 65.000.000,- realisasinya mencapai Rp 91.284.640,- atau 140,44% dari target untuk retribusi parkir, dan pada tahun anggaran 2009 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.208.340.000,- ternyata realisasinya mencapai Rp.225.842.000,- atau 108,4%. Demikian juga untuk retribusi pasar, dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2008 yaitu sebesar

Rp.3.325.296.000,- realisasinya mencapai Rp.3.389.814.330,- atau 101,9% dari target untuk retribusi pasar, dan pada tahun anggaran 2009 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.355.420,- ternyata realisasinya mencapai Rp.3.499.050.000,- atau 104,28%. Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas anggaran dari kedua retribusi tersebut sudah bagus di atas 100%.

Melihat perjalanan pengelolaan retribusi pada umumnya yang ada hingga saat ini, meskipun pendapatan pengelolaan retribusi selalu mencapai angka yang ditargetkan sendiri oleh pengelolanya, tetapi capaian target tersebut cenderung bersifat *incremental* dari target tahun sebelumnya bukan berdasarkan pada potensi yang sebenarnya, kurang maksimal dan bias terhadap potensi realita lapangan. Pola penetapan

target yang dilakukan secara incremental memungkinkan adanya potensi riil yang lebih besar belum terdeteksi secara benar/tepat. Sehingga bila hal tersebut tetap dijalankan dalam manajemen keuangan sektor publik, tidak sesuai dengan konsep akuntabilitas kinerja daerah.

Untuk itu agar dapat meningkatkan kinerjanya di bidang keuangan sektor publik, pemerintah kabupaten malang melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola retribusi parkir dan pasar, perlu menetapkan target sesuai kondisi riil dan potensi yang sebenarnya. Langkah ini dimulai dengan melihat gap capaian masing-masing retribusi (parkir dan pasar).

a. Gap Retribusi Parkir

Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, dalam penelitian ini disikapi dengan mengajukan data potensi riil, dimana untuk survey tersebut diasumsikan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Waktu efektif lokasi parkir selama 6 jam/hari (lama waktu rata-rata terpendek operasi toko (pasar)/hari)
- (2) Faktor koreksi terhadap kepadatan parkir 50% (dari kondisi survey)
- (3) Pengambilan 32 sample secara random terhadap populasi lokasi dapat mewakili kondisi keseluruhan lokasi parkir.
- (4) Ada penyesuaian tarif petugas parkir dari 15.000,-/hari menjadi 20.000.

Berdasarkan hasil survey secara sampling didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4 Data Gap Antara Potensi UPTD dengan Hasil Survey

No	Lokasi Parkir	Potensi		Gap
		UPTD	Survey	
1	Wrg Nikmat Singosari	3000	22500	19500
2	Alfa Garuda	6000	13500	7500
3	Ruko Kb Agung Pakisaji	20000	-25500	-45500
4	Psr Kromengan	15000	10500	-4500
5	Psr Tumpangrejo	5000	249000	244000
6	Shi Hing Jl Diponegoro Krg Ploso	8000	-108000	-116000
5	Mini Market Rejeki	15000	-79500	-94500
8	Wrg Mungil I Lawang	6000	7500	1500
9	Toko Ria lawang	0	16500	16500
10	Dpn Es Gunung Kepanjen	4000	46500	42500
11	Toko Adi Bungsu Kpjn	3000	-7500	-10500
12	Pamotan Wr Wiwik Dampit	2000	40500	38500
13	Bank BRI dampit	2000	-7500	-9500
14	Pasar ngantang	6500	43500	37000
15	Pasar Kasembon	2000	7500	5500
16	Jl Gajahmada Gondang Legi	5000	21000	16000
17	Utara Pasar Bl Lawang	4000	33000	29000
18	Pasar Tajinan	2000	19500	17500
19	Toko Dahlia Tumpang	9000	58500	49500

20	Depan Wr Supra	8000	31500	23500
21	Depan pasar Ponco Kusumo	11500	-36000	-47500
22	Pasar /Tk Kain Tolib dono mulyo	1000	39000	38000
23	Pasar Kalipare	1500	36000	34500
24	Depan Pasar	1500	40500	39000
25	Bakso Solo Turen	1500	-10500	-12000
26	Toko laris Turen	2000	15000	13000
27	Pasar Sumber Manjuing Wetan	3000	99000	96000
28	Toko widodo Wajak	4000	45000	41000
29	Pasar Pujon	8000	580500	572500
30	Jl Abdul Manan Pujon	3000	142500	139500
31	BCA Sumber Pucung	6000	51000	45000
32	Warung Rahayu	30000	27000	-3000
	Jumlah	198500	1422000	1223500

Sumber: Data Primer, Diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, antara realisasi retribusi parkir di APBD 2009 jika dibandingkan hasil survey terhadap 32 lokasi sample parkir, efektivitasnya baru sebesar $(198500/1052000) \times 100\% = 18.8688\%$. Dapat disimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaannya cenderung melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi apabila realisasi penerimaan tersebut dibandingkan dengan potensi riil yang ada maka terdapat

gap realisasi dan potensi sebesar 81.1312% potensi pajak/retribusi parkir yang belum terpungut.

b. Gap Retribusi Pasar

Untuk retribusi pasar, hubungan antara target, realisasi, dan potensi riil cenderung sama dengan kondisi retribusi parkir. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan besarnya potensi retribusi pasar Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hubungan Antara Target, Realisasi dan Potensi Riil

KELAS PASAR	JENIS	JML	LUAS RATA2	TARIF	HARI KERJA	PENDAPATAN
1	Toko	2095	12	200	365	1,468,176,000
	Bedak	8077	6	175	365	2,476,408,200
	Poncoan	3970	3	175	365	608,601,000
Jumlah						4,553,185,200
2	Toko	309	12	175	365	189,478,800
	Bedak	1099	6	150	365	288,817,200
	Poncoan	488	3	150	365	64,123,200
Jumlah						542,419,200
3	Toko	180	12	150	70	18,144,000
	Bedak	993	6	125	70	41,706,000

	Poncoan	114	3	125	70	2,394,000
Jumlah						62,244,000
Total						5,157,848,400

Sumber; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

- Asumsi-asumsi perhitungan;
1. Faktor koreksi hunian= 20%
 2. Hari buka untuk pasar kelas 1 dan 2 adalah 365 hari
 3. Hari buka untuk pasar kelas tiga adalah 70 hari (jumlah hari pasaran)
 4. Luas toko/kios rata-rata = 12 m²
 5. Luas bedak/los rata-rata = 6 m²
 6. Luas poncon rata-rata = 3 m²

Berdasarkan laporan APBD tahun 2009, dimana realisasi PAD dari sektor retribusi Pasar mencapai Rp.3.499.050.000, dibandingkan dengan potensi sebesar Rp. **5,157,848,400** terlihat bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Malang baru sebesar 67,8%, ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar masih dapat ditingkatkan, di mana pengukuran tingkat efektivitas ini didasarkan pada realisasi tahun 2009.

c. **Assesment Target**

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan sesuai dengan semangat reinventing governance, pemerintah seyogyanya meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi pendapatannya. Dan dengan semangat akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, penyesuaian target tersebut seharusnya dilakukan tidak semata-mata secara incremental, tetapi lebih mengedepankan potensi riil yang ada.

Assesment Target Retribusi Parkir

Berdasarkan analisis gap perhitungan retribusi parkir, didapatkan efektivitas sebesar

18,8688% dan masih ada sekitar 81,1312% potensi pajak/retribusi parkir yang belum terpungut. Kondisi ini dapat dijadikan rasionalitas justifikasi yang mendasari target baru dari retribusi parkir di Kabupaten Malang mulai tahun 2011.

Adapun target baru tersebut sebesar target riil berdasarkan survey penelitian yaitu 1/efektifitas kali realisasi saat ini atau sebesar $1/(18,8688\%) \times 225.842.000 = 1.196.905.713,-$

Assesment target Retribusi Pasar

Berdasarkan perhitungan data populasi kios, bedak-los dan poncoan sejumlah pasar di kabupaten Malang didapatkan angka potensi riil sebesar Rp. 5,157,848,400,- Dengan realisasi APBD 2009 sebesar Rp.3.499.050.000, maka tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Malang baru sebesar 67,8%, ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar masih dapat ditingkatkan, sebesar potensi riil tersebut (karena data kios sudah data sensus).

3. Analisis Elastisitas

Dalam mencermati posisi APBD, jika dilihat aspek Pendapatan asli daerahnya (PAD), mempunyai kaitan erat dengan perekonomian yang sedang berkembang di daerah bersangkutan. Semakin besar volume perekonomian daerah (lazim ditunjukkan dengan PDRB) seharusnya akan meningkatkan PAD, demikian sebaliknya. Perubahan dinamika hubungan antara keduanya dikemas dalam

konsep elastisitas PAD.

Kondisi ideal untuk hubungan elastisitas tersebut menghasilkan nilai >1 Untuk mengukur hal tersebut lazim di (elastis). Hal ini berarti perubahan perekonomian daerah juga diikuti oleh perubahan pendapatan di daerah, elastis (>1) menunjukkan bahwa penambahan PAD lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi

Tabel 6. Elastisitas PAD Kabupaten Malang periode tahun 2005-2008

TAHUN	PAD	PDRB ADHK	ELASTISITAS PAD
2005	54245450	10976206	—
2006	69651784	11617937	4.857751
2007	84353897	12325657	3.465094
2008	100327728	13034488	3.292842

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, elastisitas PAD terhadap PDRB untuk daerah kabupaten malang selama tahun 2005 – 2008 bersifat elastis, berkisar antara 4,8 sampai dengan 3,2. Hal ini menunjukkan perubahan pertumbuhan PDRB relative berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PAD, tetapi cenderung mengalami tren penurunan.

Di hubungkan dengan kondisi di lapangan, maka dapat dicermati bahwa elastisitas kenaikan pendapatan asli daerah >1 yang berangkat/dirancang secara incremental dan dalam posisi dimana pencapaian target oleh realisasi (efektifitas) tarikan retribusi untuk parkir dan pasar yang di atas 100%, menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut cukup banyak

daerah. Semakin elastis PAD terhadap PDRB, maka struktur financial daerah tersebut relative lebih Kondisi ini menunjukkan berjalannya sistem manajemen anggaran (pemungutan PAD) yang efektif dan efisien.

Adapun kondisi PAD dan PDRB kabupaten Malang selama kurun waktu 2005-2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

potensi yang masih memungkinkan untuk digali dari aspek PAD. Hanya saja untuk itu, terkait dengan penataan regulasi, terutama adanya penyusunan perda baru dan penyesuaian terhadap paradigma pengelolaan PAD, harus dipertimbangkan bahwa PERDA tersebut yang semula cenderung focus untuk memperbesar masukan langsung PAD bergeser ke arah bagaimana bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha, merangsang investasi masuk sehingga dalam jangka panjang akan lebih meningkatkan dampak tidak langsung pertumbuhan di daerah Kabupaten Malang .

Untuk kondisi hubungan pertumbuhan PAD dengan retribusi daerah di kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7 Hubungan Pertumbuhan PAD dengan Retribusi

Tahun	PAD	Growth PAD	Retribusi	Growth retribusi
2005	54245450	—	17765875	—
2006	69651784	0.284012	20842042	0.17315
2007	84353897	0.21108	17262081	-0.17177
2008	1E+08	0.189367	18478348	0.070459

Bila dilihat dari komponen retribusinya, PAD kabupaten malang selama kurun waktu 2005-2008, terlihat bahwa: kenaikan perumbuhan pad meskipun diikuti juga dengan kenaikan retribusi daerah, tetapi kenaikan retribusinya masih relatif lebih kecil dari pada kenaikan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari retribusi daerah cenderung mengecil di dibandingkan kontribusi komponen PAD yang lain. Sehingga perlu dicermati agar kondisi tersebut menjadi lebih baik.

Komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan keuangan (*political will*) menjadi prioritas utama dalam manajemen pemerintahan sector publik, kebijakan dalam pengelolaan akan sangat berpengaruh pada keseimbangan antara hasil penerimaan dan besarnya pembelanjaan. Dalam kaitanya peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten, Strategi manajemen keuangan daerah yang ditetapkan seharusnya merupakan program bersama yang sinergi antara legislative dan eksekutif dimana hal tersebut dapat diawali berdasarkan nilai elastisitas PAD. Berdasarkan angka elastisitas ini, secara desk evaluation dapat dilakukan setting target berapa persen kenaikan PAD dari tahun satu ke tahun selanjutnya.

Hanya saaja dalam mebreak-down target baru tersebut, karena

kita menyadari bahwa komponen PAD terdiri dari banyak elemen, maka perlu kajian per sektor dan harus dikontekskan dengan perubahan potensi lapangan dari masing-masing elemen tersebut. Jadi hasil desk evaluation bersifat awal/prediktif untuk melakukan setting target riil dari kondisi lapangan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dan dalam konteks pengelolaan keuangan publik yang lebih luas, Mardiasmo (2000:3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah:

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*);
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
- d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value

- for money, transparansi dan akuntabilitas;
- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;
 - f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
 - g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional;
 - h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
 - i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
 - j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi.
- efektifitasnya sebesar 18,86%.
- b. Potensi retribusi pasar kabupaten malang sebesar Rp 5.157.848.4000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.3.499.050,- maka efektifitasnya sebesar 67,8%.
 - c. Elastisitas PAD untuk daerah pada tahun 2008 sebesar 3,28 (.1) bermakna elastis dengan tren menurun, hal itu berarti ada kerawanan kondisi karena penurunan ini mengindikasikan kurang baiknya efektifitas penarikan PAD
 - d. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi peningkatan pendapatan retribusi parkir dan pelayanan pasar berada pada kuadran 2 (dua) yang artinya bahwa dominasi padakombinasi faktor kekuatan dan hambatan.

2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut.

- a. Dinas Pendapatan Daerah hendaknya dalam menetapkan target disesuaikan dengan potensi yang ada. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan melakukan survey lapangan secara berkala terhadap masing-masing lokasi, baik untuk retribusi parkir ataupun pelayanan pasar.
- b. Guna meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi ini perlu dipikirkan adanya kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan pola kerjasama yang baru

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Potensi retribusi parkir kabupaten malang sebesar Rp 1.196.905.713,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.225.842.000,- maka

- dengan pihak lain yang lebih mengedepankan akuntabilitas potensi dan target dari parkir, tidak bersifat transaksional. Disamping itu perlu juga menambah petugas pemungut retribusi untuk pelayanan pasar.
- c. Untuk mengefektifkan saran poin b, perlu ditetapkan aturan pelaksanaan (perda/perbup) yang spesifik, mampu mengakomodir dan masalah yang berkembang.
 - d. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemungutan pajak perlu dipikirkan upaya-upaya untuk lebih menertibkan petugas parkir dengan seragam lengkap dengan identitas, tidak cukup dengan rompi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., Rozali, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Dalam Negeri, 1991. *Pengukuran Kemampuan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Jakarta : Litbang Depdagri.
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., Kelly, R., 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Djojohadikusumo, Soemitro, 1994. *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Pertumbuhan*, Jakarta: LP3ES.
- Jhingan, M.L. 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E. 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, *Analisis CSIS*, No. 1, 36–53.
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, *Prisma*, No. 6, 1–17.
- Le Houerou, P. and Rutkowski, M., (1996), Federal Transfers in Russia: Their Impact on Regional Revenues and Incomes, *Comparative Economic Studies*, Vol.38 No.2/3, 21-42.
- Mahi, Raksaka. 2000. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi, *Analisis CSIS*, No. 1, 54–66.
- Nazara, Suahasil. 1997. Struktur Penerimaan Daerah Propinsi-Propinsi di Indonesia, *Prisma*, No. 7, 1–16.
- Pamudji, S., 1982, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Radianto, Elia. 1997. Derajat Otonomi Fiskal, Studi Kasus Kabupaten Dati II Maluku, *Prisma*, No. 7, 24–37.
- Rivai, G.Y.N. 1997. Analisis Kesiapan Kota Administratif Banjar Baru Menjadi Kotamadya Ditinjau dari Aspek Keuangan, *Tesis S-2*, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan)
- Riwokaho, Joseph, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sidik, M. 2000. Kebijakan Fiskal Nasional untuk Mendukung Otonomi Daerah, *Makalah*, disampaikan pada Lustrum I MEP-UGM, Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu, 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Smith, R.S. 1996. Financing Cities in Development Countries, *International Monetary Fund Staff Papers*, No. 21, 65–81.
- Todaro, M. P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*, (Terjemahan Haris Munandar), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Youwe, Hendrik Momot, 2000, Kesiapan Mimika Menjadi Daerah Otonom Ditinjau dari Aspek Keuangan, *Tesis S-2*, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan)